

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG BANTUAN
SOSIAL DAN KESEHATAN, KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN
PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

YOSI TAMARA

BP/NIM : 2016/16060124

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

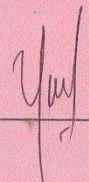
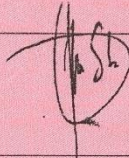
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG BANTUAN SOSIAL DAN KESEHATAN, KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Nama : Yosi Tamara
NIM/TM : 16060124/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2020

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Yewiwati, SE, ME	1. 
2	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	2. 
3	Anggota	: Doni Satria, S.E, M.Si	3. 

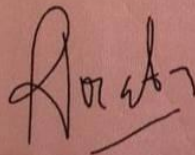
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG BANTUAN
SOSIAL DAN KESEHATAN, KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN
PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
INDONESIA**

Nama : Yosi Tamara
NIM/TM : 16060124/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

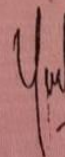
Padang, Juni 2020

Disetujui Oleh :
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Yenniwati, SE, ME
NIP. 19760222 200501 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yosi Tamara
Nim/Th. Masuk : 2016/16060124
Tempat / Tanggal Lahir : Palapa Saiyo / 12 Desember 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Perumahan Palapa Saiyo Blok A5 No. 21
No. Hp/Telephone : 081374286375
JudulSkripsi : Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan,
Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Indonesia

Dengan ini saya amenyatakan bahwa:

1. Karya tulis / skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Pada karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, tim penguji dan ketua program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juni 2020



Yosi Tamara
NIM : 16060124/2016

ABSTRAK

Yosi Tamara (16060124) : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, di bawah bimbingan Ibu Yeniwati, SE,ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; (1) Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, (2) Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, (3) Sejauhmana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, (4) Sejauhmana pengaruh pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dan (5) Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan terhadap indeks pembangunan di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dan induktif. Data yang digunakan merupakan data sekunder panel untuk 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2014-2018 diperoleh dari lembaga terkait dan kemudian dianalisis menggunakan model regresi panel dengan tidak melakukan pengujian asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya, secara parsial (1) Pengeluaran Pemerintah bidang bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (2) Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (3) Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan (4) Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Untuk kedepannya disarankan dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia Pemerintah di Indonesia lebih memprioritaskan kebijakan meningkatkan anggaran pengeluaran pembangunan dibidang bantuan sosial dan kesehatan agar kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan program-program bantuan sosial di daerah-daerah Indonesia dapat terjalani dengan baik.

Kata Kunci :Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobil'alamin hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang begitu banyak terhadap hamba-Nya, serta shalawat untuk Nabi Muhammad Shalallahu Wa'alaihi Wassalam. Dengan rahmat dan izin Allah sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia".

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut diatas dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada Ibu Yewiwati, S.E, M.E selaku pembimbing akademik beserta Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku penguji I dan Bapak Doni Satria, S.E, M.Si selaku penguji II penulis yang telah ikhlas, sabar, tulus dan penuh kasih sayang memberi waktu, kesempatan, harapan dan ilmunya dalam proses bimbingan serta motivasi, arahan, saran-saran yang sangat berarti kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa dan terhormat kepada Orang Tua dan keluarga tercinta (Mama, Papa, Kak Gebby dan Bg Bayu) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a yang tak henti dilangitkan, pencapaian ini adalah semua berkat do'a do'a mereka ☺.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Melti Roza Adry, S.E, M.E selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, S.E, M.M
4. Ibu Yeniwati, S.E, M.E selaku Pembimbing atas ilmu, bimbingan, motivasi dengan penuh sabar, tegas dan konsisten mendengarkan keluhan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini di waktu yang diinginkan.
5. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku penguji I dan Bapak Doni Satria, S.E, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Kak Lidya selaku Admin Jurusan atas bantuan terkait urusan kelulusan kompre dan wisuda serta hal-hal lain yang terkait skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapat referensi.
9. Kepada rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali dan senior-senior dan adek-adek junior Jurusan Ilmu Ekonomi atas berbagi ilmu, tukar pikiran saran serta dukungannya satu sama lain.
10. Kepada seluruh kawan-kawan Konsentrasi Ekonomi Publik dan sahabat-sahabat terdekat angkatan 2016 yang sama-sama berjuang atas pencapaian masing-masing serta dukungannya.
11. Kepada sahabat-sahabat tercinta seperjuangan Novilia Hartisa, Anatasyia Dwi Utami, Mediani Puspa Rahayu, Yohana Pranita, Dheylya Permatasari, dan Annisa Khaira atas do'a, dukungan, semangat dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat yang sudah 11 tahun ini membersamai yosi Unbiologict Sist Cika Afrilia, Yelchi Multri Meisya, Novia Syafrilla, dan Fitri Agusti Rahayu atas dukungan satu sama lain yang tak sia-sia Alhamdulillah.
13. Kepada sahabat Volunteer YNP Kak Mita, Kak Cipi, Viony, Kak Uci, Dilla, Nia, Kak Ujik dan Kak Insya atas do'a, dukungan serta sharing banyak ilmu baik di bidang science maupun religion yang membantu akan selesainya skripsi ini.
14. Kepada sahabat Pejuang Masa Depan Novilia Hartisa, Lara Yuli Rusdy, Hafiz Zen, Aulia Irfan, Muhammad Abram dan Fajar Hendito R. yang sama-sama berjuang dalam suka duka dan bersedia untuk membantu akan selesainya skripsi ini.
15. Kepada kak Rimma Febby yang sudah banyak membantu berbagi ilmu, do'a dan semangatnya yang tak ada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada sahabat seperjuangan jaman bimbel-sekarang Sonya dan Ninit yang jika disusah senangkan selalu ada dalam pencapaian ini.
17. Kepada kawan-kawan SMA SMS Squad yang sama-sama berjuang Nanda, Piya, Angga, Randi, Veby, Bg Yudi, Leon, Yogi, Tyo dan Tomi yang sama-sama berjuang di jalan kita masing-masing.
18. Dan Finelis Coffee sebagai salah satu tempat ternyaman dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Aamiin Yaa Rabbal'alamin. Dengan tulus penulis

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua.

Padang, Mei 2020

Yosi Tamara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II.....	14
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori	14
1. Indeks Pembangunan Manusia	14
2. Pengeluaran Pemerintah	17
a) Hukum Wagner	18
b) Teori Paacock dan Wiesman	19
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial terhadap Indeks PembangunanManusia.....	20
4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	21
5. Konsumsi	23
6. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	24
7. Pendidikan.....	28
8. Pengaruh Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	29
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis	35
BAB III37METODOLOGIPENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37

C. Jenis Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Defenisi Operasional	39
F. Teknik Analisis Data	41
1. Analisis Deskriptif.....	41
2. Analisis Induktif	41
a. Alat Analisis Regresi Data Panel.....	41
b. Metode Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	44
c. Uji Asumsi Klasik.....	47
d. Koefisien Determinasi (R^2)	48
e. Pengujian Hipotesis	49
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
a. Keadaan Geografis Indonesia.....	51
b. Jumlah Penduduk Indonesia	52
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	55
a. Deskripsi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	55
b. Deskripsi Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial di Indonesia.....	58
c. Deskripsi Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Indonesia.....	63
d. Deskripsi Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia	66
e. Deskripsi Perkembangan Pendidikan di Indonesia	69
3. Analisis Data	72
a. Analisis Statistik Deskriptif.....	72
b. Analisis Induktif	73
c. Uji Pemilihan Model Data Panel	73
d. Uji Langrange Multiplier	74
e. Uji Regresi Data Panel.....	76
f. Koefisien Determinasi	78

g. Pengujian Hipotesis	79
B. Pembahasan Hasil Penelitian	81
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	81
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	84
3. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.....	86
4. Pengaruh Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	88
BAB V.....	90
KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2009-2018.....	9
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2010-2018	52
Tabel 4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Indonesia Tahun 2014-2018.....	55
Tabel 4.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Indonesia Tahun 2014-2018	59
Tabel 4.4 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Indonesia Tahun 2014-2018	63
Tabel 4.5 Perkembangan Pendidikan di Provinsi Indonesia Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Langrange Multiplier	70
Tabel 4.9 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i> (REM)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	35
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indikator capaian pembangunan kualitas hidup manusia dan standar mengukur taraf kualitas hidup manusia. Kualitas hidup yang mendasar terhadap pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan. IPM sendiri berlandaskan dari pokok pembahasan mengenai pembangunan manusia. Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang budaya, politik, sosial maupun ekonomi, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, tujuannya adalah dapat menghasilkan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki harapan umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Badan Pusat Statistik 2018).

Konsep pembangunan manusia dapat diukur menggunakan tiga dimensi dasar manusia yakni umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Indikator yang mewakili umur panjang diwakili oleh harapan hidup saat lahir. Indikator yang mewakili pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan Indikator yang mewakili standar hidup layak diwakili oleh pendapatan

atau pengeluaran per kapita. Ketiga cakupan ini dapat dijelaskan dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Di Indonesia yang dikategorikan negara sedang berkembang peran dalam sumber daya manusia sendiri ditetapkan ditempat yang sentral, terkhusus untuk pencapaian dalam segi pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusialah yang dijadikan tujuan utama dalam ekonomi masyarakat. Tidak pada bidang ekonomi saja tetapi juga dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Hal ini merupakan bagian penting dalam suatu pengukuran dari IPM, karena jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat hal itu dapat membuat peningkatan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas upaya mendorong majunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pentingnya sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan ekonomi. Hal ini dikarenakan modal dasar dari suatu bangsa, faktor produksi dan produktivitas dan eksplorasi sumber daya alam yang melimpah serta membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional merupakan hal yang pasti menyatu dalam kesinambungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak diseimbangi sumber daya alam yang tak terbatas tidak akan mampu dapat dikelola. Akan tetapi peningkatan perekonomian suatu daerah tidak bergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, namun melainkan lebih terfokus pada kualitas manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak tercipta dari segi nilai komparatif saja,

namun juga dapat dilihat dari nilai inovatif seperti wawasan ilmu pengetahuan, kreativitas dan imajinasi, dan tidak lagi hanya menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot dan sebagainya.

United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan pemerintahan saat ini memiliki kewajiban dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan yang terkait menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Penasihat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia memperjelas dalam beberapa tahun upaya dan langkah pengurangan kesenjangan sudah ada pada program pemerintahan saat ini, hanya saja kesenjangan masih dikatakan masih memberati pada sebagian wilayah tetapi statusnya belum benar-benar menyempit artinya masih dikatakan ada kesenjangan, sedangkan tingkat pembangunan tidak bisa dicapai jika populasi di Indonesia dalam keadaan sedang tidak membaik. Kelompok perempuan, etnis minoritas, dan masyarakat yang menetap di sebagian daerah terpencil menghambat majunya pembangunan manusia. Selain itu, kesenjangan teknologi yang berdampak pada pelayanan kesehatan yang kurang optimal juga menjadi masalah di Indonesia saat ini. Dari beberapa kasus inilah yang mendukung untuk ketertinggalan dalam majunya pembangunan manusia dan menyebabkan kesenjangan yang signifikan.

United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan terdapat beberapa indikator kesenjangan ada yang bertolak belakang dengan IPM di Indonesia. Pertama, kelaparan dan tingkat kemiskinan yaitu

adanya orang indonesia yang hidup dengan biaya kurang dan banyak nya penduduk yang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat kematian dan kesehatan tercatat sebanyak dua juta anak dibawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap dan angka kematian ibu yang mencapai sebanyak dua ratus ribu. Serta yang ketiga akses ke layanan dasar yaitu hampir lima juta anak tidak bersekolah. Dengan melihat adanya permasalahan diatas, maka indonesia dapat dikategorikan sebagai negara (*medium human development*) atau kategori negara menengah untuk pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Pembangunan Manusia/*Human Development Report* (HDR) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk tahun 2015 IPM Indonesia adalah sebesar 68,9%, dan pada tahun 2018 sebesar 69,4% ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah dan berada di posisi 116 dari 146 negara, bila dibandingkan dengan negara yang sama-sama berkembang yaitu salah satunya Malaysia Indonesia masih jauh tertinggal. Dimana IPM Malaysia mencapai 80,2% dengan posisi 57 dari 146 negara. Hal tersebut disebabkan kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia seperti kemiskinan, kelaparan, angka kematian ibu, dan kesehatan. Ini menjelaskan bahwa permasalahan ketimpangan dan kesenjangan menjadi tantangan bagi Indonesia meskipun mengalami kemajuan ekonomi karena pembangunan manusia tidak bisa maju apabila kalau setengah populasi kita tidak membaik. Untuk itu pemerintah

Indonesia lebih mengusahakan agar manfaat pembangunan ekonomi tersebar luas dan mencapai IPM yang tinggi.

Apabila negara dikatakan maju jika yang dijadikan patokan salah satunya adalah permasalahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjelaskan seberapa besar perkembangan manusia disuatu negara. Berdasarkan uraian permasalahan yang bertolak belakang dengan IPM diatas maka ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi IPM dan perlu diperhatikan sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia yaitu diantaranya pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial dan kesehatan dimana pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatur upaya terwujudnya perekonomian Indonesia dengan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan setiap tahun dalam bentuk pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah yang berasal dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, belanja daerah diutamakan untuk mengupayakan kualitas kelangsungan hidup masyarakat dengan tujuan mencapai suatu pencapaian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial dan bentuk pelayanan dasar lainnya yang layak serta memenuhi persyaratan serta mengembangkan jaminan sosial dengan memenuhi standar harga, belanja dan tolak ukur kerja. Menurut pendapat Rostow dalam model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah

mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, bentuk aktifitas pemerintah berpindah dari kebijakan penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan, program pelayanan kesehatan (Mangkoesobroto, 2001) Karena itu pemerintah perlu memperbaiki dan mengalokasikan kebijakan-kebijakannya. Sebab itu, masyarakat kelas bawah bisa memperbaiki perkembangan kualitas pendidikannya dan juga kualitas kesehatan yang tetap dijaga disetiap wilayah seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan dan akses air bersih dan ketersediaannya. Sejalan dengan teori yang dikemukakan Rostow pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan dan aktivitas sosial tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran bantuan sosial yang saat ini sedang dialokasikan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PNPM mandiri, fasilitas bagi penyandang disabilitas serta bantuan dalam penanggulangan bencana alam. Dimana Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai wujud keadilan serta pemerataan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pengeluaran bidang kesehatan juga berpengaruh terhadap IPM hal ini seiring dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, dijelaskan pada variabel pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial dimana pemerintah daerah mengeluarkan belanjanya lebih memprioritaskan terhadap bidang

kesehatan seperti jaminan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang tidak memadai atau tidak layak sehingga kelengkapan untuk kesehatan dapat di aplikasikan pada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang kesehatan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan manusia di indikator angka harapan hidup.

Selanjutnya faktor konsumsi rumah tangga juga berpengaruh terhadap IPM, menurut Badan Pusat Statistik (2014) pengeluaran konsumsi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi seseorang. Sedangkan menurut Franco Modigliani (Mankiw, 2006:461) menjelaskan bahwa pendapatan bervariasi di kehidupan seseorang yang membuat konsumen bisa mengalihkan pendapatan dimasa hidupnya ketika pendapatan tinggi ke masa hidupnya di pendapatan rendah. Interpretasi ini menggambarkan siklus daur hidup dan menurut hipotesis ini konsumsi bergantung pada pendapatan. Sejalan dengan teori yang juga dikemukakan oleh Keynes (Mankiw, 2006:447) berpendapat bahwa pendapatan adalah komponen konsumsi yang paling penting. Artinya, dari beberapa teori yang diungkapkan para ahli diatas sebagian besar mengemukakan bahwa besar kecilnya jumlah konsumsi seseorang tergantung pada besar kecilnya pendapatan. teori konsumsi tersebut memiliki keterkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Dimana IPM sendiri dihitung berdasarkan salah satunya dengan kemampuan daya beli seseorang terhadap sejumlah kebutuhan yang

dikonsumsi dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan pada variabel indeks pembangunan manusia.

Selain itu, pendidikan diduga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi IPM. Strategi pembangunan di beberapa negara sebagian besar lebih memprioritaskan pada rencana pembangunan kualitas modal manusia dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan. Investasi pendidikan bisa meningkatkan modal manusia di sektor perkonomian. Rasidin dan Bonar (2005) menjelaskan bahwa dengan adanya investasi dalam pendidikan adalah modal dan bisa membantu peningkatan pengetahuan serta keterampilan seseorang. Seperti angka melek huruf yang tinggi, yaitu kemampuan baca tulis orang dewasa yang diukur dengan proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf adalah salah satu indikator pendidikan yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan masyarakat dengan melihat tinggi rendah persentase masyarakat yang melek huruf yang dapat dijadikan sebagai ukuran kemajuan bangsa.

Dari uraian diatas dapat diketahui pada Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial dan kesehatan, konsumsi rumah tangga dan pendidikan dari tahun 2009 sampai 2018.

Berikut adalah Tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan dari Tahun 2009-2018

TAHUN	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)	Pengeluaran Pemerintah Bidang Bansos (Milyar Rupiah)	Pert %	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Juta Rupiah)	Pert %	Konsumsi Rumah Tangga (Rupiah)	Pert %	Pendidikan (Persen)
2009	71,76	4.246	-	38.312	-	217.720	-	92,58
2010	72,27	3.627	-14,58	34.546	-9,83	254.520	16,90	92,91
2011	72,77	4.008	10,5	42.467	22,93	293.556	15,34	92,81
2012	73,29	1.830	-54,3	51.684	21,70	323.478	10,18	93,25
2013	73,81	2.267	23,88	58.885	13,93	356.435	10,19	93,25
2014	68,9	1.641	-27,6	60.137	2,13	388.350	8,96	93,92
2015	69,55	3.404	1,07	26.710	-55,6	412.462	6,21	95,12
2016	70,18	3.405	0,03	86.017	22,4	460.639	11,68	95,22
2017	70,81	4.130	21,3	134.897	56,8	527.956	14,62	95,38
2018	71,39	5.268	27,56	145. 528	7,88	556.899	5,48	95,92

Sumber: Badan Pusat Statistik dan DJPK Kemenkeu(2009-2019)

Tabel 1.1 menyajikan data perkembangan dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial dan kesehatan, konsumsi rumah tangga dan pendidikan di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2018. Pada tahun 2009 sampai 2018 pengeluaran pemerintah yang dilihat dari bidang bantuan sosial berfluktuasi, Namun pada tahun 2010 dan 2012 penurunan terhadap pengeluaran pemerintah malah mengakibatkan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Sementara pada tahun 2014 penurunan pengeluaran pemerintah dialami hal yang sama oleh indeks pembangunan manusia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya penurunan kebijakan dari pemerintah terhadap realisasi belanja bantuan sosial dan belanja pemberdayaan sosial.

Selanjutnya Tabel 1.1 menyajikan data pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2009 sampai tahun 2018. Terlihat pada tabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berfluktuasi. Pada Tahun 2010 dan 2015 penurunan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengakibatkan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini diduga karena rendah dan kurangnya realisasi fasilitas kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada Tabel 1.1 juga memperlihatkan konsumsi rumah tangga yang dilihat dari rata-rata pengeluaran konsumsi untuk makanan per penduduk per bulan pada tahun 2009 sampai 2018 di Indonesiayang cenderung mengalami peningkatan. Terlihat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah

tangga angka tertinggi yaitu pada tahun 2010 sebesar 16,90% dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Hal ini diduga karena pada tahun 2010 adanya penurunan harga-harga komoditi sektor makanan sehingga mendorong masyarakat lebih konsumtif terhadap makanan dibandingkan tahun-tahun lainnya. Akan tetapi pada tahun 2014 dengan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga justru tidak seiring dengan indeks pembangunan manusia yang mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 68,9%.

Tabel 1.1 selanjutnya memperlihatkan data perkembangan pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf dari tahun 2009 sampai 2018 di Indonesia yang juga cenderung mengalami peningkatan angka tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 95,92% dibandingkan tahun yang lainnya. Tetapi besarnya peningkatan pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf dari tahun ke tahun tidak terlalu besar karena dari tahun 2009-2018 sudah mendekati angka 100 persen yang menggambarkan bahwa masyarakat sudah mampu membaca dan menulis. Hal tersebut menggambarkan tingginya angka melek huruf dapat mewujudkan peningkatan pendidikan. Namun pada tahun 2014 peningkatan pendidikan tersebut tidak seiring dengan penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 68,9% hal tersebut diduga karena masih rendahnya kualitas dan fasilitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, untuk menunjukkan apakah variabel diatas berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia hal ini perlu dilakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang diperoleh, yaitu:

1. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
4. Sejauh mana pengaruh pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
5. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

3. Mengetahui konsumsi rumah tangga terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
4. Mengetahui pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
5. Mengetahui pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta meningkatkan wawasan dan keterampilan penulis ketika menghadapi fenomena-fenomena dalam masyarakat.
2. Sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan seperti: Pemerintah Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan Indonesia.
3. Sebagai perluasan wawasan ilmu pengetahuan, terkhusus untuk Ilmu Ekonomi Makro dan Ilmu Ekonomi Pembangunan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
4. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk penelitian permasalahan yang serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2018) Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana masyarakat bisa mengakses hasil pencapaian untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia dikenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) di Tahun 1990 dan dipublikasikan secara bertahap dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). *United Nations Development Programme* (UNDP) memaparkan indeks pembangunan manusia dalam *Human Development Report* Tahun 1996 dimana penduduk dapat mengembangkan disetiap pilihannya yang dapat memenuhi kelangsungan hidupnya. Pendapatan adalah salah satu faktor penentu akan tetapi kesehatan dan pendidikan dan lingkungan fisik faktor yang lebih penting lainnya.

Dalam ilmu ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) digunakan sebagai dasar penilaian kuantitatif modal manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang komprehensif, yang mencirikan melekat dan pengukuran prestasi negara dalam hal kesehatan dan panjang umur, pendidikan dan realisasi pendapatan warganya. (Todaro M. P., 2009) indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara yang mencakup

dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Tujuan pencapaian utama IPM adalah membuktikan bahwa disuatu negara dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik dan menghasilkan kualitas manusia yang menjamin sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebaliknya, jika pendapatan tinggi seseorang pun tidak menjamin pencapaian pembangunan manusia yang tinggi pula (Mankiw, 1992) indeks pembangunan manusia dianalisis dalam tiga bidang utama, yang diperkirakan oleh indeks lain yang tercantum dibawah ini:

- a. Indeks harapan hidup, merupakan indikator utama yang mengukur tingkat kesehatan pada warga negara tertentu.
- b. Indeks pendidikan, yang mencakup akses terhadap pendidikan, yang diukur dari rata-rata lama sekolah anak dan jumlah tahun bersekolah dari populasi orang dewasa.
- c. Indeks pendapatan yang merupakan hal utama menilai tingkat kehidupan (kualitas hidup, indeks ini diukur dengan nilai rata-rata pengeluaran perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang menyatu digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata di suatu negara dalam empat dimensi dasar dalam pembangunan diantaranya lama hidup diukur dengan angka harapan ketika lahir, pendidikan dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dengan konsumsi perkapita. yang diukur dengan angka berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dengan konsumsi perkapita nilai

indeks ini berkisar antara 0-100. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan suatu indeks komposit yang tergabung dalam tiga dimensi mengenai pembangunan manusia, umur panjang dan hidup sehat. Indeks tersebut tidaklah ukuran yang secara menyeluruh mengenai pembangunan manusia. Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia tidak memberikan indikator penting seperti halnya ketidaksertaraan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan siklus politik atau kebebasan politik. Indeks tersebut mewarnai sudut pandang yang luas guna menunjang kemajuan manusia dan meninjau masalah yang rumit antara kesejahteraan dan penghasilan (UNDP, 2004). Rumus penghitungan IPM dapat diuraikan sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3}(X1 + X2 + X3) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana :

X1 : Angka harapan hidup

X2 : Angka pendidikan

X3 : Angka standar hidup layak

Sebelum menghitung IPM, komponen IPM dihitung indeks menjadi yang bernilai 0 (terburuk), dan 1 (terbaik). Agar memudahkan untuk menganalisisnya indeks dikalikan 100.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) status pembangunan manusia juga menjadi hal yang penting. Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

Sangat Tinggi	: $IPM \geq 80$
Tinggi	: $70 \leq IPM < 80$
Sedang	: $60 \leq IPM < 70$
Rendah	: $IPM < 60$

Modal manusia adalah faktor utama yang menjadi pendukung majunya pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk modal manusia yang berkualitas baik sehingga dengan hal itu kinerja ekonominya juga lebih baik dan sesuai dengan pendapat Mubyarto, (Mailendra 2009) ‘*social development is development*’. Sedangkan menurut (Todaro, 1998) sumber daya manusia di suatu negara adalah faktor yang sangat menentukan dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan sosial ekonomi.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) mencerminkan tanggung jawab pemerintah (Mangkoesobroto, 2002) yaitu upaya dan kewajiban pemerintah dalam mengatur keberhasilan perekonomian Indonesia dengan cara menentukan besar kecilnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah di setiap tahunnya yang berdasarkan pada dokumen atau kas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Daerah untuk wilayah.

Pengeluaran pemerintah adalah aspek yang digunakan secara langsung pada sumber daya ekonomi dan dikuasai oleh pemerintah serta tak langsung dimiliki oleh masyarakat dengan pembayaran pajak. Pajak

yang dibayarkan masyarakat diterima oleh pemerintah akan dimanfaatkan untuk macam-macam kegiatan pemerintah. Dimana wujud dari kegiatan tersebut adalah mengalokasikan pengeluaran baik pada sarana dan prasarana seperti penyediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, jalan, sekolah, irigasi serta kepentingan masyarakat lainnya (Sukirno, 2004:38). Selain itu menurut (Boediono, 1998) pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan untuk transfer payment yang dilakukan dengan pemberian langsung pada masyarakat berupa subsidi dan bantuan langsung.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa kesehatan adalah hak dasar manusia, pemerintah dapat bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan perlindungan dan fasilitas kesehatan pada setiap masyarakat. Pada tujuan pembangunan nasional disebutkan pada setiap orang berhak dapat memiliki kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka dari itu kesehatan wajar menjadi investasi pemerintah untuk pengeluaran terutama pembangunan pengembangan sumber daya manusia.

a) Hukum Wagner

Hukum menurut Wagner menjelaskan teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang besar persentasenya terhadap PNB, Wagner juga menjelaskan dalam suatu perekonomian jika pendapatan per kapitanya meningkat maka secara otomatis pengeluaran pemerintah pun juga meningkat. ((Mangkoesobroto, 2001)

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

Keterangan:

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita

1,2...n : Jangka waktu tahun

b) Teori Paacock dan Wiesman

Paacock dan Wiesman menjelaskan teori mengenai bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah yang baik. Teori ini mendasari pada pandangan bahwa pemerintah selalu mengupayakan dan mengusakan untuk memperbesar pengeluaran sedangkan bagi masyarakat yang tidak suka bayar pajak yang semakin besar pula untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. (Mangkoesobroto, 2001)

c) Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah Rostow dan Musgrave

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yang dikelompokkan antara tiga tahap yakni tahap pertama, kedua dan ketiga. Tahap pertama perkembangan ekonomi investasi pemerintah dianggap lebih besar terhadap total investasi hal itu ditunjang karena pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana kesehatan, pendidikan dan transportasi. Tahap kedua terhadap pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

investasi pemerintah tetap diperlukan agar ekonomi bisa maju.
(Mangkoesobroto, 2001)

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Mengenai Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran dalam bentuk transfer uang maupun barang dan jasa yang diberikan oleh pihak Pemerintah Pusat/Daerah pada masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan dari permasalahan sosial dan ekonomi, meingkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi. Misalnya seperti jaminan sosial, fasilitas pendidikan, penyediaan aksesibilitas, penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial dan lain-lain. Sehingga dengan adanya realisasi bantuan sosial ini dapat mengembangkan kelangsungan hidup masyarakat dan meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Menurut Baswir (Sinulingga, 2008) secara umum anggaran dari pemerintah diartikan menjadi susunan dan perencanaan keuangan yang menggambarkan suatu periode di masa yang akan datang dalam pilihan kebijaksanaan. Struktur anggaran ini mencerminkan pengelompokkan susunan komponen anggaran yang mendasari kerangka tertentu. Susunan anggaran pemerintah dalam sistem anggaran di Indonesia dikenal dengan pengeluaran pembangunan. Dimana pengeluaran pembangunan ini bentuk

pengeluaran yang dialokasikan sebagai wujud investasi pemerintah antara lain sektor bantuan sosial pendidikan serta infrastruktur. Sejalan dengan kewajiban pemerintah sebagai pengupaya peran alokasi, distribusi dan stabilisasi untuk itu kewajiban negara baik sektor pendidikan dan infrastruktur serta bantuan sosial menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, dimana tanggung jawab pemerintah harus dapat diwujudkan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia di wilayahnya baik dari sarana pendidikan yang meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, dengan adanya peningkatan kualitas tersebut akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan indikator yang mendasarinya. Selain itu, masyarakat yang memiliki tubuh sehat adalah input dalam mengurangi angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk jangka panjang (Wahid, 2012).

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Saputri (2014:2 menjelaskan pada teori *human capital* ada bentuk berinvestasi yang benar yaitu meningkatkan kekuatan emosioanal fisik dan kesehatan. Masyarakat akan hidup sehat apabila ada penunjang dimana faktor yang utama menunjang adalah pemerintah apalagi pemerintah semakin banyak dalam mengeluarkan dana di sektor kesehatan. Pada Indeks Pembangunan Manusia sendiri terdapat dimensari dasar salah

satunya kesehatan yang mencakup adanya angka harapan hidup seseorang, artinya ketika seseorang memiliki kesehatan yang baik akan membantu memiliki umur yang panjang serta dapat mempengaruhi kualitas hidupnya.

Menurut Lains dan Pasay aspek pendidikan lebih penting dalam indek pembangunan manusia, Tjiptoherijanto (1989) melihat dari sisi kesehatan terdapat mutu manusia yang sangat mempengaruhi sumber daya manusia, artinya aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas manusia. Angka harapan hidup mengecil, angka kematian ibu dan bayi meningkat atau rendahnya kesehatan tiap penduduk mencerminkan kualitas manusia yang buruk. Purcal dan Cohen menyatakan akumulasi pengeluaran pemerintah untuk belanja publik merupakan akibat dari paradigma usang kesehatan, investasi dan juga adanya campur tangan pemerintah terhadap perwujudan perkembangan indeks pembangunan manusia.

Teori *public finance* (Musgrave, 1989) menyatakan bahwa dana alokasi pemerintah pada bidang kesehatan juga berlaku dimana hal tersebut sangat perlu untuk menunjang kesehatan masyarakat diukur dengan angka harapan hidup sebagai salah satu dimensi dasar IPM. Seperti misalnya adanya bantuan sosial pada sarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah seperti jaminan kesehatan, dokter atau ahli medis ketersediaan failitas dan akses yang mudah digunakan masyarakat yang akan meningkatkan angka harapan hidup .

Maryani (2012) menyatakan bahwa belanja pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap IPM, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Rostow bahwa kegiatan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi, aktifitas dan kegiatan pemerintah berpindah menjadi program-program sosial seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan dari kegiatan sebelumnya yang merencanakan pembangunan ekonomi. (Mangkoesobroto, 2001). Artinya, dengan adanya program-program kesejahteraan dan pelayanan kesehatan tersebut merupakan sebagai wujud peningkatan pembangunan manusia di Indonesia.

5. Konsumsi

Konsumsi dijelaskan sebagai belanja terhadap barang atau jasa yang dilakukan oleh setiap orang atau rumah tangga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang dapat digolongkan seperti pangan, sandang dan papan.

Melihat gambaran setiap beban yang dipenuhi masyarakat yang telah produktif terhadap non produktif dapat digunakan pada setiap ketergantungan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori *Life Cycle Model* atau model daur hidup yang digagas oleh Modigliani (Richard, 2004) pada aktivitas menabung dan mengkonsumsi dijelaskan bahwa yang mempengaruhi pola perilaku konsumsi yaitu umur atau usia masyarakat.

John Maynard Keynes menguraikan dalam bukunya makroekonomi pada fungsi konsumsi terdapat hubungan langsung antara jumlah konsumsi atau *current disposable income* dengan pendapatan. (Mankiw N. G., 2007).

Dalam beberapa studi hasil survei dari para peneliti rumah tangga mengenai data pendapatan serta konsumsi mereka menemukan konsumsi lebih banyak apabila pendapatan rumah tangga tinggi. Dapat dihubungkan pada fungsi konsumsi yang menggambarkan suatu grafik atau kurva hubungan pendapatan nasional dengan tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian tersebut.

Keynes menguraikan analisis statistik yang membuat peramalan tentang konsumsi yang berlandas pada intropeksi dan observasi. Yang pertama kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) dimana untuk menghasilkan pendapatannya antara satu dan nol adalah pada setiap jumlah kebutuhan yang dikonsumsi. Kecenderungan konsumsi marginal ini adalah rekomendasi dari kebijakan Keynes untuk menghilangkan pengangguran yang meningkat. Kebijakan dari pemerintah lah yang membantu akan perubahan perekonomian pada kebijakan fiskal yang ada pada pendapatan dan konsumsi.

6. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2006) indikator kesejahteraan rumah tangga terwujud dari bagaimana pola rumah tangga dalam konsumtif terhadap kebutuhannya. Besar atau kecilnya konsumsi pengeluaran terhadap seluruh rumah tangga untuk makanan memberikan kesejahteraan pada rumah tangga tersebut. Dapat dimaknakan ketika penghasilan rumah tangga meningkat maka semakin kecil tingkat pengeluaran untuk makanan

terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Artinya bahwa rumah tangga apabila sejahtera ketika pengeluaran terhadap makanan nya lebih kecil dibandingkan pengeluaran terhadap non makanan.

Menurut Franco Modigliani (Mankiw, 2006:461) menjelaskan secara sistematis di kehidupan seseorang memiliki pendapatan yang bervariasi. Dimana seseorang dapat alihkan pendapatan dikehidupannya ketika penghasilan tinggi ke masa hidup yang berpendapatan rendah yang sesuai dengan dasar hipotesis daur hidup. Menurut hipotesis ini konsumsi bergantung pada pendapatan. Sejalan dengan teori yang juga dikemukakan oleh Keynes (Mankiw, 2006:447) mengatakan bahwa pendapatan komponen penting terhadap konsumsi. Artinya, besar kecilnya jumlah konsumsi seseorang tergantung pada besar kecilnya pendapatan. teori konsumsi tersebut memiliki hubungan dengan indeks pembangunan manusia. Sesuai dengan penelitian Niken, (2017) hasil penelitiannya membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif pada IPM Dimana indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan dengan rata-rata pengeluaran per orang sebagai dimensi atau pendekatan pendapatan.

Sedangkan menurut Hukum Engel (Bhakti, 2014) ketika rumah tangga konsumtif terhadap makanan hal itu berarti tingkat kesejahteraan rumah tangganya rendah dibandingkan dengan yang tidak konsumtif atau proporsi pengeluaran makanan rendah. Ada macam-macam bentuk konsumsi rumah tangga tak lain yaitu: pangan, sandang, papan, sarana

transportasi, kebutuhan jasmani dan rohani, rekreasi dan tabungan. Engel mengatakan ketika pendapatan seseorang meningkat maka pengeluaran terhadap makanan pun turun atau tak konsumtif terhadap makanan meski pendapatannya meningkat dengan selera yang tetap. Dapat dimaknakan elastisitas pendapatan pada makanan lebih kecil dari satu. Keynes (Mankiw N. G., 2003) mengatakan kecenderungan konsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun pada saat pendapatan naik. Selaras dengan teori tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Ginting (2008) membuktikan konsumsi rumah tangga pada makanan memberikan efek negatif terhadap IPM. Karena semakin tinggi tingkat konsumtif makanan rumah tangga menggambarkan rumah tangga tidak sejahtera karena penghasilannya hanya dipenuhi banyak untuk kebutuhan pangan sementara untuk kebutuhan lainnya belum terpenuhi.

Aktivitas rumah tangga seperti mengkonsumsi makanan, menggunakan pakaian, mengkonsumsi obat-obatan dan aktivitas belajar adalah bentuk kontribusi yang konkret terhadap kemajuan indikator-indikator dasar pada indeks pembangunan manusia melalui pengeluaran rumah tangga seperti pada bahan pokok, kebutuhan air bersih serta kesehatan dan sekolah (Ranis, 2004). Sifat konsumtif terhadap aktivitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya pada sejumlah faktor yang berhubungan dengan indeks pembangunan manusia tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh kemampuan daya beli atau pendapatan. Ketika kemampuan daya beli nya tak sanggup atau pendapatan menurun

mengakibatkan keterbatasan dalam sejumlah pengeluaran akibatnya dapat memicu untuk mengurangi untuk belanja pada makanan yang bergizi serta pendidikan yang lebih tinggi (Ramirez, 1998). Rumah tangga lebih banyak mengeluarkan pendapatannya terhadap makanan yang mengandung asupan gizi baik beserta nutrisinya (UNDP, 1996). Oleh sebab itu, apabila distribusi pendapatan baik maka akan memperbaiki kemampuan daya beli penduduk atau rumah tangga miskin yang mendorong mereka untuk membelanjakan sejumlah pengeluarannya agar bisa memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga.

Akan tetapi dalam konsep tujuan pembangunan milinium atau ‘*Millennium Development Goals*’ atau MDGs (UNDP, 2008) menyatakan bahwa salah satu tujuannya yaitu perkembangan kualitas SDM dimana sasaran utamanya adalah tak jauh dari pembangunan kualitas SDM itu sendiri. Ada empat target yang akan diwujudkan pembangunan millinium yang tak jauh berkaitan dengan bidang kesehatan. Karena hal ini menjelaskan peran kesehatan sangatlah penting sebagai investasi atau aset pembangunan suatu bangsa dalam mencari sumber SDM. Kualitas sumber daya manusia dilihat dari kualitas fisik seperti sehat jasmani dan non fisik secara rohani yang diukur dari tingkat kecerdasan ditentukan pada gizi yang seimbang. Mengonsumsi makanan mengandung gizi baik sebagai wujud pencapaian kesehatan yang sangat menentukan perkembangan fisik dan non fisik terhadap penentuan kualitas SDM yang menunjang untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

7. Pendidikan

(Todaro M. &, 2006)mengatakan untuk membentuk kemajuan negara berkembang apalagi dinegara sendiri di Indonesia, pendidikan adalah investasi utama juga selain dari konsumsi. Karena pendidikan sendiri dapat menghasilkan penyerapan teknologi canggih maupun modern sebagai wujud kapasitas yang besar untuk bekal dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan mencakup dua komponen sebagai kunci keberhasilan yakni komponen pertumbuhan yang vital sebagai input produksi, komponen kedua sebagai input sekaligus outpun yang mendukung pendidikan begitu penting dalam pembangunan ekonomi.

(Todaro M. &, 2006)pendidikan dapat didefenisikan sebagai menciptakan ide, kreasi dan inovasi, mengadopsi untuk memperoleh wawasan, namun aksesibilitas untuk memperoleh kesempatan berpendidikan tersebut tidak rata bagi kalangan masyarakat dibawah. Pendidikan merupakan upaya untuk menyatakan manusia ke arah dewasa melalui pendidikan masyarakat mendapat kesempatan untu membina kemampuan mengatur pola kehidupan dan membuka kesempatan untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pendidikan dapat menciptakan aspek teknologi canggih maupun modern bagi pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Salah satu komponen yang mengikat pendidikan yakni sebagai input output yang menjadikan pendidikan itu adalah hal yang sangat vital terhadap pembangunan ekonomi. Seseorang yang tingkat pendidikanya lebih tinggi didukung

dengan melek huruf dan lama sekolah yang lebih baik hal itu akan mencerminkan pada produktivitas dan indeks pembangunan manusia dengan baik.

8. Pengaruh Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Ridwan dan Prasetyo (2013) membuktikan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia. Meier (Winarti, 2014:41) Jika wawasan, keterampilan dan ide seseorang melalui pendidikan itu tinggi maka akan mudah bagi seseorang untuk bekerja dan mengerti. Mengaplikasikan dan memperoleh output dari majunya teknologi modern dan canggih sehingga bisa menumbuh kembangkan standar ekonomi yang baru dan hidup bangsa ditingkatkan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Jika pendidikannya maju hal tersebut akan mendukung untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut penelitian Richardson, (2014) dijelaskan antara pendidikan, kesehatan dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan secara positif. Suatu indikasi yang menyatakan bahwa perkembangan di bidang-bidang ini menunumbuh kembangkan pembangunan manusia. Dan juga hal tersebut dapat memperbaiki secara lebih besar. Todaro (2008:434) menyebutkan pendidikan hal yang mendasar bagi setiap individu serta hal pokok untuk mencapai kehidupan yang sangat menentukan kesejahteraan nya sehingga sangat melekat untuk membentuk manusia yang cerdas pada inti makna pembangunan.

Pendidikan merupakan bagian penting terhadap pencapaian seseorang yang bersifat jangka panjang. Pendidikan memiliki peranan khusus untuk pencapaian suatu negara terlebih pada teknologi modern khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Tak hanya itu, pendidikan suatu hal yang fundamental mengembangkan kapasitas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan. Pendidikan adalah salah satu investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Todaro, (2011) bahwa yang melekat terhadap ilmu, ide, gagasan dan keterampilan adalah modal manusia yang merupakan bentuk investasi yang produktif bagi orang-orang yang melakukannya. Schultz (1961) mengemukakan mengenai *Investment In Human Capital* menyatakan pendidikan bentuk investasi pembangunan. Secara perkembangannya ia memperlihatkan manusia dapat berkontribusi langsung pada posisi pembangunan sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari pencapaian peningkatan keterampilan dan keahliannya. Dengan terbentuknya keahlian dan keterampilan yang difokuskan oleh manusia akan mengupayakan tingkat pendidikan akan semakin berkembang sehingga akan meningkatkan mutu pembangunan manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terdahulu dalam penelitian ini antara lain:

1. Ridwan Maulana, Prasetyo Ari Bowo (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011” membuktikan pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM hubungan antara pendidikan dengan kualitas hidup adalah tinggi nya pendidikan maka akan mengakibatkan tingginya IPM.
2. Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, Suprpto (2014), yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012” membuktikan bahwa variabel konsumsi rumah tangga pada makanan memiliki efek negatif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia.
3. I made Jember, (2016) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode: 2005-2013” menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan belanja daerah efek positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia.
4. Hasil penelitian Niken Sulistyowati, Bonarmarulitua sinaga, Novindra (2017) yang berjudul “ *Impact Government Expenditure and Household Expenditure On Human Development Index*”

menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

5. Hasil penelitian Zul Azhar (2019) yang berjudul ‘’Analisis Kausalitas Shock Harga Minyak Dunia, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pemerintah’’ menyatakan bahwa harga minyak dunia memiliki hubungan kausalitas dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk kerangka berfikir untuk menampilkan, menguraikan dan menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan dengan rumusan masalah yang berlandaskan kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya pengaruh antara variabel independen yang menggunakan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial (X1), Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2), Konsumsi Rumah Tangga (X3) dan Pendidikan (X4) serta variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Dari penelitian ini melihat adanya pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di indonesia.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial (X1) diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Indonesia dapat dilihat dengan adanya realisasi pengeluaran pemerintah seperti dana bantuan sosial dapat memenuhi kelangsungan hidup dan

kualitas manusia yang meliputi realisasi fasilitas pendidikan, jaminan sosial, penanggulangan bencana hal tersebut akan mampu membantu peningkatan indeks pembangunan manusia dengan indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup tingkat melek huruf pada masyarakat.

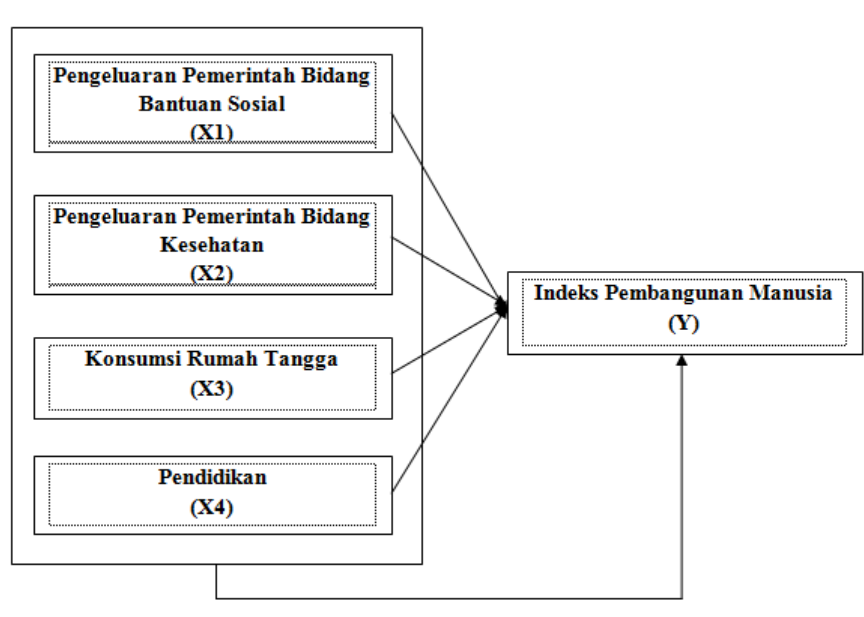
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Indonesia dapat dilihat dengan realisasi dana pengeluaran pemerintah seperti fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih hal tersebut dapat menumbuhkan kelangsungan hidup masyarakat dan mengembangkan indeks pembangunan manusia terhadap indikator angka harapan hidup pada masyarakat.

Konsumsi Rumah Tangga (X3) diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Indonesia artinya aktivitas rumah tangga seperti mengkonsumsi makanan memberikan pengaruh besar pada peningkatan indeks pembangunan manusia dengan melakukan atau mengeluarkan sejumlah pendapatannya untuk belanja untuk makanan. Aktivitas rumah tangga yang cenderung berbelanja berkaitan dengan kemampuan daya beli atau distribusi pendapatan sebagai besarnya pengeluaran per kapita.

Pendidikan (X4) diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Indonesia artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia. Karena pendidikan yang tinggi sangat menunjang keberhasilan

pembangunan. Apabila pendidikan seperti angka melek huruf tinggi hal itu akan mencerminkan masyarakat sudah menguasai membaca dan menulis yang tinggi artinya kontribusi pendidikan memberi pengaruh besar terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 1.1 yaitu:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dapat diduga beberapa uraian hipotesis dibawah ini sebagai wujud jawaban sementara pada rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Adapun rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan konsumsi rumah tangga terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Secara bersama-sama pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien } \beta \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model *Random Effect Model* dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas dengan variabel terikat seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dengan probabilitas $0,4116 > \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia ditolak.
2. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dengan probabilitas $0,0008 > \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dapat diterima.
3. Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dengan probabilitas $0,0000 < \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dapat diterima.

4. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dengan probabilitas $0,0000 < \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dapat diterima.
5. Pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan probabilitas $0,0000 < \alpha = 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial dan kesehatan, konsumsi rumah tangga dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah di Indonesia lebih memprioritaskan kebijakan meningkatkan anggaran pengeluaran pembangunan dibidang bantuan sosial dan kesehatan agar kualitas pelayanan kesehatan dan program-program bantuan sosial di daerah-daerah Indonesia dapat terjalani dengan baik.
2. Penulis mengharapkan peneliti ataupun pengembang ilmu selanjutnya dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan terhadap indeks

pembangunan manusia di Indonesia karena penulis menyadari penelitian ini masih terdapat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- a, Canterbury, E., Duraiappah, A. K., Naeem, S., Agardy, T., Ash, N. J., Cooper, H. D., Díaz, S., Faith, D. P., Mace, G., McNeely, J. a., Mooney, H. a., Alfred A. Oteng-Yeboah, Henrique Miguel Pereira, Polasky, S., Prip, C., Reid, W. V., Samper, C., Schei, P. J., Scholes, R., Schutyser, F., ... Mea. (2013). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Amalia, F., & Purbadharmaja, I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Ketersediaan Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(6), 257–264.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia 2015. *Badan Pusat Statistik*.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- Dini, L., & Dwiandari, Y. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : ddini.yasinthaa@yahoo.co.id / Telp : + 6281547124301 . 22, 1741–1770.*
- Dwiandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p04>
- Ekonomi, J., & Rumah, P. (2017). *Jejak*. 10(1), 412–428.
- Expenditure, H. (2017). Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 10(2), 412–428. <https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11305>
- Gujarati, D. N. (2006). Econometria Básica. In *Basic Econometrics*.
- Hajamini, M., & Falahi, M. A. (2014). The nonlinear impact of government consumption expenditure on economic growth: Evidence from low and low-middle income countries. *Cogent Economics and Finance*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23322039.2014.948122>
- Hidayah, F., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2018). ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *EcoGen*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jhingan. (2004). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. In *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. In *Unisia*.